

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kewenangan Direcção Nacional de Terras, Propriedade e Serviços Cadastrais dalam pelaksanaan pendaftaran tanah telah mewujudkan kepastian hukum hal ini di karenakan semua diatur berdasarkan aturan hukum positif yang berlaku dan di pertegaskan lagi dalam Peraturan Menteri Kehakiman namun dalam hal pendistribusian sertifikat belum menjamin kepastian hukum di karenakan belum disahkannya Proposta de Lei No. /2010 Regime Especial para a Definicao da Titularidade dos Bens Imoveis oleh Presiden, dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Timor-Leste sebanyak 4 sebagai hukum positif dan Proposta de Lei No. /2010 Regime Especial para a Definicao da Titularidade dos Bens Imoveis yang belum dijadikan sebagai hukum positif dan di veto oleh presiden agar dapat di revisikan kembali oleh Parlamen Nasional untuk memperkuat atau mewujudkan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan.

B. Saran

1. Bagi Parlamen Nasional de Timor-Leste

Agar dapat mengurangi konflik pertanahan yang terjadi di Timor-Leste maka harus segera merivis kembali Proposta de Lei No. /2010 Regime Especial para a Definicao da Titularidade dos Bens Imoveis yang telah di veto oleh Presiden agar dapat memberikan hak

pemilikan bagi warga negara Timor-Leste tanpa melihat kepada status sosial warga negara.

2. Presiden Republic Democratica de Timor-Leste

Agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang supaya dapat memberikan hak kepemilikan dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negara.

3. Pemerintah Timor-Leste melalui Direcção Nacional de Terras, Propriedade e Serviços Cadastrais.

Agar dapat memberikan kepastian hukum bagi warga negara maka pemerintah harus mendaftarkan tanah secara keseluruhan di Wilayah negara dan dapat menerbitkan sertifikat hak kepemilikan atas tanah terhadap warga negara berdasarkan kewenangan yang di limpahkan.

4. Lembaga akademisi dan lembaga lembaga non departemen

Bagi lembaga akademis dan lembaga-lembaga non departemen yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam menganalisis serta mengevaluasi kegiatan kewenangan Direcção Nacional de Terras, Propriedade e Serviços Cadastrais dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Timor-Leste untuk mewujudkan kepastian Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Achmad Ali, 1966, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Amiruddin dkk. 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Avelino M.Coelho, 2012, *Dua Kali Merdeka Esei Sejarah Politik Timor-Leste*, Djaman Baroe Yogyakarta, Yogyakarta
- Candra, S, 2005, *Sertipikat Pemilikan Hak Atas Tanah*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Effendi, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Friedman, Lawrence, 1984, *American Law*, W.W. Norton & Company, London.
- Fajar, Mukti, dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Istanto, Sugeng, 2004, *Kebijakan Publik, Edisi Revisi*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- Istanto, Sugeng, 2011, *Politik Hukum, Diktat Mata Kuliah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Iskandar, Pranoto & Junadi Yadi, 2011, *Memahami Hukum di Indonesia*, IMR Press, Cianjur.
- J.Papasi, 1999, *Manajemen Administrasi Negara*, Lembaga administrasi Negara, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya.
- John Rawls, 2011, *A teory Of Justie (Teori Keadilan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Murhaini Suriansyah, 2009, *Kewenangan Pemerintah Daerah (Mengurus Bidang Pertanahan)*, LaksBang Justitia, Surabaya.
- Mukti, Fajar ND, dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri, 2005, *Pengantar Perpajakan, Edisi Ketiga*, Granit, Jakarta.
- Peter, Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum (cetakan ke 6)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, 1992, *Ilmu Hukum*, Sinar Baru. Bandung.
- Susanto Happy, 2010, *Panduan Lengkap Menyusun Proposal*, Visimedia, Jakarta.

- SoerjonoSoekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (cetakan 13)*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Tjahjo Arianto, 2010, Disertasi: Problematika Terbitnya Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah, Surabaya.
- Utama, Arya, Made, I, 2007, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Sutra, Bandung.
- Urip Santoso, 2011, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

MAKALAH:

- Antonio Vicente Marques Soares, 2003, Pulau Timor Sebuah Sumbangan untuk Sejarahnya.
- P. Suryoeuwamo, Pemilikan Tanah di Timor-Timor, 1993
- Pedro de Sousa Xavier, 1997, Studi Tentang Hukum Pertanahan Adat Timor-Timur di Kecamatan Uato Carbau Kabupaten Viqueque.
- Tjahjo Arianto, Sejarah, Organisasi dan Kelembagaan Bapan Pertanahan Nasional, Tahun 2012

Internet:

<http://bahasa.kemdiknas.go.id>

<http://www.itaniarai.tl>

[webs,www.mj.gov.tl/dntp.index.htm](http://webs.www.mj.gov.tl/dntp.index.htm)

Farid hidayat di 02.48, kadaster, surveyor, tanah
<http://kadastersurvey.blogspot.com/2009/03/tanah.html>

QEDO40 di 11.35 <http://qedo40.blogspot.com/2010/06/beberapa-masalah-dalam-teori.html>

Sonny Harry B. Harmadi 16 Maret 2012 - 23:37 WIB Timor-Leste menatap Masa depan.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2012/03/120316_timor_analysis.shtml

<http://pendaftaran-tanah.blogspot.com/2008/08/sistem-pendaftaran-tanah.html>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Constituição Republica Democratica de Timor-Leste 2002 (Konstitusi Republik Demokrasi Timor-Leste Tahun 2002).

Lei No 1 / 2003, de Marco Regime Juridico dos Bens Imoveis I parte :
Titularidade dos Bens Imoveis(Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Aset-aset dan Harta Benda yang tidak Bergerak)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan
Nasional Indonesia

DECRETO-LEI N° 7/2007 ORGANICA DO IV GOVERNO
CONSTITUCIONAL (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007
tentang Stuktur Organik Pemerintah IV Konstitusi Republik Demokratik
Timor-Leste).

DECRETO-LEI N°.12/2008 ESTATUTO ORGÂNICO DO MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Statuto
Organik Menteri Kehakiman).

DIPLOMA MINISTERIAL N.º 035 /2009 ESTRUTURA ORGÂNICA DA
DIRECÇÃO NACIONAL DE TERRAS, PROPRIEDADE E
SERVIÇOS CADASTRAIS (Peraturan Menteri Kehakiman No 35
Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Direktorat Nasional Pendaftaran
Tanah dan Bangunan).

PROPOSTA DE LEI NO. /2010 REGIME ESPECIAL PARA A DEFINIÇÃO
DA TITULARIDADE DOS BENS IMÓVEIS (tentang Regulasi Khusus
Untuk Penentuan Kepemilikan Benda Tidak Bergerak).